

Komunikasi Kebijakan Manggala Agni dalam Pengendalian Karhutla saat Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau

Dara Fitria¹, Anuar Rasyid², Welly Wirman³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Riau

Cara Mengutip: Fitria, D., Rasyid, A., & Wirman, W. (2022). Komunikasi Kebijakan Manggala Agni dalam Pengendalian Karhutla saat Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 4(2), 177-185. doi: <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i2.146>

ARTICLE INFO

Article History

Received : 23 Juni 2022

Revised : 4 Juli 2022

Accepted : 1 Agustus 2022

DOI :

<https://doi.org/10.33366/jkn.v4i2.146>

Keywords:

policy communication;
forest and land fires;
covid-19

Email corresponding author

dara.fitria1768@grad.unri.ac.id

PENERBIT

UNITRI PRESS

Jl. Telagawarna, Tlogomas-
Malang, 65144, Telp/Fax:
0341-565500



This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. CC-BY-SA

ABSTRACT

The emergence of Covid-19 virus which massively entered Indonesia had an impact on the Government's policy of implementing social distancing to the enactment of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). It makes Manggala Agni innovates in daily activities communicating the policy for controlling forest and land fires. The purpose of this study is to explain how Manggala Agni communicated policies on controlling forest and land fires during the Covid-19 pandemic in Riau Province in 2020, knowing the communication media used and describing communication barriers encountered in the field. In this study, researchers used a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. This study uses Miles and Huberman model of field data analysis techniques. The result showed that Manggala Agni communicated the policy of controlling forest and land fires with interpersonal communication and group communication. Interpersonal communication media used are face-to-face communication, then group communication by involving the Fire Care Community (MPA) and utilizing social media and zoom meeting applications, therefore during the Covid-19 pandemic, Manggala Agni can still communicate the policy for controlling forest and land fires.

ABSTRAK

Kemunculan virus Covid-19 yang secara masif masuk ke Indonesia berdampak pada kebijakan pemerintah dalam menerapkan sosial distancing hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini membuat Manggala Agni melakukan inovasi dalam kegiatan harian mengkomunikasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Manggala Agni mengkomunikasikan kebijakan pengendalian Karhutla pada masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau tahun 2020, mengetahui media komunikasi yang digunakan dan mendeskripsikan hambatan komunikasi yang ditemui di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data lapangan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manggala Agni mengkomunikasikan kebijakan pengendalian Karhutla dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Media komunikasi interpersonal yang digunakan seperti komunikasi *face to face*, kemudian komunikasi kelompok dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta memanfaatkan media sosial dan aplikasi Zoom Meeting sehingga pada saat Pandemi Covid-19, Manggala Agni tetap dapat mengkomunikasikan kebijakan pengendalian Karhutla.

Pendahuluan

Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sangat besar pada tahun 2015, pemerintah Indonesia melakukan berbagai reformasi kebijakan yang menjadi bagian dari reformasi administrasi. Intervensi kebijakan dimaksudkan untuk mengubah paradigma lama terkait pemadaman Karhutla menuju paradigma baru yang merupakan sistem utuh pengendalian (Zulkifli, 2021). Dalam kaitannya dengan kejadian berulang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla).

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk para pihak terkait. Sehingga efektivitas dan efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi lebih terjamin. Satuan Tugas (Satgas) Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sementara, organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pemerintah yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Brigadalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Dalam keadaan normal, Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) ini sebagai sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada publik dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung dengan mengumpulkan puluhan hingga ratusan masyarakat di suatu ruangan tertentu dan juga sosialisasi tidak langsung melalui media massa, surat edaran dan lainnya.

Kemunculan virus Covid-19 yang secara masif masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 dan ditetapkan oleh Badan Kesehatan PBB (WHO) sebagai pandemi, mengubah banyak hal dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Memiliki ciri menyerang fisik melalui gangguan pernafasan, menjadikan virus Corona sebagai ancaman ‘kembar’ bagi kesehatan masyarakat, selain ancaman rutin Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di periode waktu rawan. Virus Covid-19 pertama terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Kompas.com, 2022). Sedangkan di Riau pasien Covid-19 pertama ditemukan pada tanggal 13 Maret 2020 (Syukur, 2021). Pandemi Covid-19 berdampak pada kebijakan Pemerintah menerapkan *sosial distancing* hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga Manggala Agni melakukan inovasi dalam kegiatan harian mengkomunikasikan kebijakan pengendalian Karhutla.

Hovland, Janis dan Kalley mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain (Mani & Guntoro, 2020). Sementara itu, Wilbur Schramm (Suprpto, 2006) menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process*), Schramm menguraikan:

“Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) latin *communis* yang berarti umum (*common*) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commonness*) dengan seseorang. Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap”.

Dari uraian Schramm itu dapat disimpulkan bahwa sebuah komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan (*commonness*), kesepahaman antar sumber (*source*) dengan penerima (*audience-receiver*). Sebuah komunikasi akan benar-benar efektif apabila audience menerima pesan, pengertian dan lain-lain persis sama seperti apa yang dikehendaki oleh penyampai. Rogers bersama Kincaid dalam Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik (Mani & Guntoro, 2020) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Sementara itu kebijakan diartikan sebagai seperangkat aturan, maupun program atau gagasan sehingga, kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan seperangkat aturan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Maka, komunikasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat diartikan sebagai suatu proses berbagi informasi, ide, atau sikap mengenai aturan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan perkataan lain, komunikasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bermaksud mengkhayalkan rumusan kebijakan yang sudah sah (*legitimated*) tersebut kepada khalayak luas.

Mengacu pada Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016 diperkuat dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini nantinya melihat cara Manggala Agni mengkomunikasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 di Provinsi Riau.

Tabel 1. Luas Karhutla Provinsi Riau 2016-2019 (Sebelum Covid)

2016	2017	2018	2019
85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00

Sumber: (*sipongi.menlhk.go.id*)

Tabel 2. Luas Karhutla Provinsi Riau 2020 (Setelah Covid)

2020	15.442,00
------	-----------

Sumber: (*sipongi.menlhk.go.id*)

Inilah yang menjadi *problem statement* dan dalam kerangka inilah dipandang perlu adanya kajian tentang Komunikasi Kebijakan Manggala Agni dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Di Provinsi Riau. Pemerintah tentu memiliki kebijakan khusus yang diimplementasikan untuk dikomunikasikan atau diinterpretasikan kemudian disosialisasikan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan tujuannya. Metode ini seringkali disebut metode penelitian yang naturalistik dikarenakan peneliti melakukan dengan cara melihat kondisi yang alamiah. Maksud dari penelitian yang dilakukan ini dengan metode kualitatif harus lebih didekati dengan pendekatan fakta yang terjadi di lapangan, untuk mendapatkan fakta yang terjadi maka peneliti melakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner serta didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait erat dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah Manggala Agni Provinsi Riau, Komplek BBKSDA Riau Jalan H.R Soebrantas, Panam, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan waktu penelitian pada bulan Agustus 2021 hingga Februari 2022. Adapun yang menjadi subjek penelitian yakni Organisasi dan Pejabat Kantor Wilayah Manggala Agni Riau dan yang menjadi objek penelitian Model Komunikasi Kebijakan Pengendalian Karhutla Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Provinsi Riau.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menggunakan Teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman (Sugiyono, 2011). Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *coclusion drawing/verification*. Langkah dalam aktivitas analisis data model Miles and Huberman adalah, Reduksi Data, Penyajian Data dan yang terakhir Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Sementara, untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, peneliti menggunakan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Menurut informan, dalam menjalankan tugasnya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, Manggala Agni mempunyai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencegahan, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kemudian dengan pemadaman, yaitu kegiatan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran serta penanganan pasca terjadinya kebakaran, yang mencakup identifikasi, evaluasi, rehabilitasi dan melakukan pemantauan lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Meski dalam situasi pandemi, pekerjaan rutin pengendalian Karhutla tetap dilaksanakan tim di lapangan yang terdiri dari anggota Manggala Agni (KLHK), TNI, Polri, BPBD, BNPB, BPPT, BMKG unsur Pemda lainnya, swasta dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Antisipasi dini Karhutla tidak bisa menunggu, meski di situasi pandemi Covid-19. Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan sedini mungkin. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Riau. Semua tentu memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duet bencana pada masa pandemi Covid-19 serta agar masyarakat dapat menghirup udara segar. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai produk kebijakan publik yang disampaikan kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan masa depan masyarakat.

Manggala Agni Sebagai Komunikator Kebijakan

Unsur pertama dalam suatu proses komunikasi kebijakan pengendalian karhutla adalah komunikator. Komunikator didefinisikan sebagai pihak yang menjadi sumber suatu pesan. Keberhasilan komunikasi salah satu penentunya dapat disebabkan oleh eksistensi komunikator (Kartikawati et al., 2018). Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, komunikatornya dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya Manggala Agni (KLHK), kemudian didukung BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI/Polri.

Keberhasilan komunikasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh komunikator. Karena keputusan seseorang menerima atau menolak suatu pesan juga bergantung pada sejumlah faktor

interpersonal yang meliputi, kedekatan, daya tarik, kesamaan dan wewenang. Sebagai komunikator kebijakan pengendalian Karhutla, Manggala Agni menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada komunikan atau khayalak.

Sifat Komunikasi dalam Kebijakan Publik

Dalam hal kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tertuang dalam Permen LHK No 32 Tahun 2016, maka sifat komunikasi dalam kebijakan pengendalian Karhutla adalah:

1. Informatif

Fungsi informasi dari komunikasi kebanyakan dihubungkan dengan komunikasi massa, tetapi informasi dapat pula dilakukan dalam komunikasi antarpersona karena pada hakikatnya informasi itu adalah mengkomunikasikan dan memberitahukan pendengar tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Intinya, sifat komunikasi informatif yaitu, pesan yang disampaikan komunikator tujuannya hanya untuk memberikan pengetahuan kepada komunikannya. Jadi, sasaran utama pesan yang bersifat informasi hanya untuk menjangkau publik pada level perubahan kognitif atau pengetahuan.

Dalam komunikasi kebijakan Manggala Agni dalam pengendalian karhutla, dilakukan melalui sosialisasi baik secara langsung *face to face* maupun tidak langsung melalui media massa, surat edaran dan lain sebagainya.

2. Persuasif

Bagi kegiatan kebijakan publik, komunikasi persuasif jelas amat penting. Komunikasi persuasif dapat berlangsung secara tatap muka. Sebagai komunikasi tatap muka, maka komunikasi persuasif dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni percakapan, dialog dan wawancara.

Dalam komunikasi kebijakan Manggala Agni, komunikasi persuasif dilakukan saat kegiatan patroli di lapangan.

3. Edukatif

Komunikasi juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan (Soedarsono et al., 2011; Khoiruddin, 2013). Sosialisasi dapat menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai masyarakat secara efektif, sedangkan pendidikan dapat membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas. Fungsi edukasi yang merupakan bentuk aplikasi dari komunikasi adalah penyuluhan. Penyuluhan mampu mengubah masyarakat menjadi tahu, mau dan akhirnya mampu melakukan sesuatu. Dengan demikian, penyuluhan yang dilakukan Manggala Agni dalam penyadartahuan masyarakat tentang bahaya karhutla, mampu memberikan perubahan pada pemahaman dan pengertian. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan dapat dijadikan sebagai bagian yang integral dari strategi komunikasi dalam kebijakan publik.

Media Komunikasi Kebijakan Pengendalian Karhutla

Salah satu tujuan komunikasi pemerintah adalah untuk menjalin hubungan erat kepada semua *stake holder*, baik secara internal maupun eksternal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan media sebagai saluran pesan. Media komunikasi yang digunakan Manggala Agni Korwil Riau dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan padam masa pandemi Covid-19 tahun 2020 di Provinsi Riau, yaitu media interpersonal, media

kelompok dan media sosial. Ketiga media tersebut memiliki eksistensi yang berbeda-beda dalam mendiseminasikan kebijakan pengendalian karhutla. Penggunaan banyak media dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan dapat pula memberikan peluang dalam membangkitkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Media Interpersonal

Media interpersonal adalah saluran komunikasi yang memungkinkan komunikator dapat menjalin interaksi secara langsung dengan komunikan. Media interpersonal merupakan saluran komunikasi yang sering digunakan Manggala Agni Riau dalam menyampaikan kebijakan pengendalian karhutla. Penggunaan media interpersonal, secara operasional dilakukan melalui proses diskusi, merespons aspirasi, tanggapan dan masukan dari khalayak. Kemampuan Manggala Agni Riau dalam melaksanakan kebijakan pengendalian karhutla tidak terlepas dari besarnya eksistensi komunikasi interpersonal.

Secara teoritis komunikasi yang menggunakan media interpersonal memungkinkan terjadi beberapa hal. *Pertama*, komunikasi interpersonal merupakan tipe komunikasi yang berorientasi pada pengaruh. Asumsi filosofinya bahwa manusia suka berkomunikasi dengan manusia yang lain karena itu setiap orang selalu berusaha agar lebih dekat satu sama lain. Kedekatan (*proximity*) bisa menyatakan dua pihak mempunyai hubungan yang erat. Kedekatan interpersonal mengakibatkan seseorang mampu menyatakan pendapat-pendapatnya dengan bebas dan keterbukaan diri yang tinggi (*self-disclosure*). Keterbukaan diri merupakan tipe komunikasi yang bersifat langsung dan intim. Keterbukaan diri akan sulit terjadi dalam suasana komunikasi publik, komunikasi organisasi dan komunikasi kelompok besar, apalagi komunikasi massa. *Kedua*, menciptakan kedalaman dan keluasan hubungan (*depth relation*), di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat menjajaki pihak lain seraca detail sehingga keraguan dapat tereduksi dan informasi yang akan diperoleh menjadi lebih memadai.

Ketiga, terjadinya penetrasi sosial (*social penetration*). Kedalaman relasi akan mengakibatkan adanya keintiman yang awalnya hanya dalam relasi yang superfisial. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang menjadikan jarak dan ruang antarpartisipan menjadi dekat, maka peluang untuk terjadinya penetrasi sikap dan emosi yang tinggi, sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami keinginan (West & Turner, 2017). *Keempat*, pengukuhan atau penegasan (*confirmation*). Dalam suatu peristiwa komunikasi bagi seseorang terkadang memiliki tujuan untuk mengukuhkan atau penegasan terhadap keputusan menerima atau menolak suatu ide/gagasan baru. Kekurangan informasi dapat terpenuhi ketika seseorang mencarinya dengan melibatkan beragam sumber termasuk melalui media interpersonal.

Komunikasi interpersonal memungkinkan adanya umpan balik secara langsung sehingga ekspresi diri dari partisipan dapat terlihat secara langsung. Kemudian, seseorang ketika membangun komunikasi dengan orang lain dalam rangka mencari pengukuhan sikap, apakah menerima atau menolak suatu pesan. Dominannya penggunaan bentuk komunikasi interpersonal oleh Manggala Agni dalam melakukan komunikasi kebijakan pengendalian karhutla, maka kecenderungan warga untuk mengukuhkan dan mempercepat sikap penerimaan terhadap kebijakan semakin besar. Karena melalui komunikasi interpersonal, warga dapat melakukan konfirmasi secara langsung terhadap dimensi-dimensi kebijakan yang meragukan dan masih bersifat samar sehingga sikap penerimaan terhadap kebijakan menjadi kuat. Misalnya, apa yang akan didapatkan warga jika melakukan pembukaan lahan tidak dengan membakar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan media interpersonal dalam komunikasi kebijakan pengendalian karhutla merupakan media primer yang dapat menghilangkan resistensi, membangkitkan kesadaran, pemahaman dan kesediaan untuk menerima suatu kebijakan.

Media Kelompok

Masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi sehingga susah untuk menyatukan komunikasinya dalam satu waktu. Oleh karena itu, media kelompok digunakan untuk memudahkan kebijakan Manggala Agni terdifusi secara merata sampai kepada masyarakat. Terbentuknya kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan kebijakan Manggala Agni. Masyarakat Peduli Api (MPA) ini dijadikan sebagai media sosialisasi, diskusi dan negosiasi. Penggunaan media kelompok dan interpersonal dalam komunikasi kebijakan pengendalian karhutla dapat menjadi penyebab efektivitas penerimaan kebijakan.

Media Sosial

Media sosial dalam proses komunikasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan mempunyai eksistensi yang besar terutama dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi kebijakan pengendalian karhutla yang dilakukan Manggala Agni pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020. Penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi Manggala Agni dimaksudkan agar kebijakan sampai kepada masyarakat secara cepat dan serentak. Kemudian, media sosial juga berperan sebagai penguat atau pendukung dari komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok.

Penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi Manggala Agni berada di bawah kendali humas di masing-masing daerah operasional (Daops). Konten yang dimuat di media sosial berupa informasi tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, larangan membakar hutan serta ancaman bahaya ganda Covid-19 dan karhutla juga peraturan-peraturan tentang pengendalian karhutla.

Hambatan Komunikasi Kebijakan Pengendalian Karhutla

Menurut Eisenberg, ada empat jenis hambatan komunikasi yang sering disebutkan oleh para ahli, yaitu hambatan proses, hambatan fisik, hambatan semantik dan hambatan psiko-sosial (Liliweri, 2015). Dalam komunikasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 di Provinsi Riau yang dilakukan Manggala Agni terdapat hambatan dalam proses komunikasinya berupa hambatan fisik dan teknik.

Hambatan yang terjadi pada ruang dan tempat ketika berlangsungnya komunikasi. Misalnya, jarak komunikasi yang jauh, tempat umum atau publik, suasana bising dan sebagainya. Hambatan fisik juga terjadi pada alat yang digunakan dalam komunikasi, misalnya telepon dengan kekuatan jaringan signal yang lemah dan lainnya.

Dalam komunikasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Manggala Agni Riau, hambatan fisik terjadi karena Pandemi Covid-19 berdampak pada pemberlakuan *sosial distancing*, Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga terjadinya pengurangan anggaran yang berdampak pada kegiatan penyuluhan rutin pengumpulan masyarakat dalam suatu ruangan yang ditiadakan. Di samping itu, juga adanya hambatan dikarenakan jaringan internet yang belum

merata ke pelosok desa. Sehingga informasi serta penyadartahuan yang disampaikan melalui sosial media belum diterima oleh seluruh masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kesimpulan

Komunikasi Kebijakan yang dilakukan Manggala Agni Riau meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Provinsi Riau. Media yang digunakan untuk mengkomunikasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di Provinsi Riau adalah; media komunikasi interpersonal, media komunikasi kelompok, dan media sosial. Dalam mengkomunikasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada masa Pandemi Covid-19, ditemui hambatan fisik berupa penerapan *sosial distancing*, PSBB, PPKM, hingga hambatan teknis jaringan internet yang belum merata ke pelosok desa.

Saran

Meski dinilai berhasil, Manggala Agni Riau disarankan lebih mensosialisasikan secara massif keberadaan kanal-kanal digital official Manggala Agni Riau dan jajarannya. Meski konten-konten kanal digital ini secara konten sudah cukup mumpuni, namun pengunjung dan *followernya* masih sangat diperlukan ditingkatkan. Supaya bisa cepat merespon informasi yang berkembang di publik, untuk itu kanal-kanal media sosial perlu disiapkan tenaga-tenaga untuk merangkum dan melayani komentar dan masukan dari publik. Meski diakui, Riau Bebas Asap pada tahun 2020, keberhasilan menekan munculnya titik api ini di Provinsi Riau, tidak semata-mata hanya faktor keberhasilan dari Komunikasi Kebijakan Manggala Agni, saran untuk penelitian selanjutnya tentu perlu penelitian lebih luas untuk mengetahui faktor lainnya.

Daftar Pustaka

- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang PenanggulanganKebakaran Hutan Dan Lahan
- Kartikawati, D., Radjagukguk, D. L., & Sriwartini, Y. (2018). Peran Komunikator dalam Komunikasi Multikultural pada Sekolah Inklusi di SD 179 Sarijadi, Bandung. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 02(81), 197–206.
- Khoiruddin, A. (2013). Peran Komunikasi dalam Pendidikan. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 23(1), 118–131. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.17>
- Kompas.com. (2022). 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19?page=all>
- Liliweri, A. (2015). *Komunikasi Antarpersonal*. Jakarta: Kencana.
- Mani, L., & Guntoro, B. (2020). *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik Teori dan Contoh Kasus Aplikasinya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.3/PPI/SET/Kum.I/4/2020 tentang Organisasi Dan Wilayah Kerja Manggala Agni.
- Soedarsono, D. K., Kunci, K., & Komunikasi, : (2011). Pesan Komunikasi Pendidikan di Media Televisi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi /MAKNA*, 2(2), 49–57.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, T. (2006). *Berkarir di Bidang Broadcasting*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Surat Edaran Nomor: SE.2/BPPIKHL-Sum/Tu/Peg/3/2020 tentang Perubahan Jadwal Piket Bekerja di Kantor Lingkup Balai PPIKHL Wilayah Sumatera.
- Syukur, M. (2021). *Cerita Dokter Yovi Bersama Tim 13 Rawat Pasien Pertama Covid-19 di Riau*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4525914/cerita-dokter-yovi-bersama-tim-13-rawat-pasien-pertama-covid-19-di-riau>
- West, R., & Turner, L. H. (2017). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Palikasi (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zulkifli, A. (2021). *Koreksi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Analisis Kepemimpinan Transglobal Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar*.